

# PENGARUH IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, *GOOD GOVERNANCE,* PENATAUSAHAAN ASET TETAP, DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH KOTA TEGAL (STUDI KASUS PADA OPD KOTA TEGAL)

**SKRIPSI**

# Oleh: Fadiya Nurarifiani NPM: 4320600053

Diajukan Kepada:

# PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL 2024









# ABSTRAK

# Fadiya Nurarifiani, 2024 “Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, *Good Governance,* Penatausahaan Aset Tetap, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota Tegal ( Studi Kasus Pada Opd Kota Tegal)”. Laporan skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses pencatatan akuntansi yang memberikan informasi guna mengambil keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintah, *good governance,* penatausahaan aset tetap dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan di Opd Kota Tegal. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data primer menggunakan kuisioner. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 72 pegawai di 36 OPD di Kota Tegal., diolah menggunakan program SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. *Good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penatausahaan aset tetap tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

# Kata Kunci : implementasi standar akuntansi pemerintah, *good governance*, Penatausahaan aset tetap, pengawasan keuangan daerah, kualitas laporan keuangan

## ABSTRACT

***Fadiya Nurarifiani, 2024 "The Influence of Implementation of Government Accounting Standards, Good Governance, Administration of Fixed Assets, and Regional Financial Supervision on the Quality of Tegal City Regional Financial Reports (Case Study of Tegal City Opd)". Accounting thesis report, Faculty of Economics and Business, Pancasakti University, Tegal***

*Financial reports are the final result of the accounting recording process which provides information for making decisions by various interested parties. This research aims to determine the influence of the implementation of government accounting standards, good governance, fixed asset administration and regional financial supervision on the quality of financial reports in Tegal City Opd. This research is quantitative research with primary data using a questionnaire. The population in this study was 72 employees in 36 OPDs in Tegal City, processed using the SPSS version 22 program. The research results showed that the implementation of government accounting standards had an effect on the quality of financial reports. Good governance influences the quality of financial reports. Administration of fixed assets has no effect on the quality of financial reports. Regional financial supervision has no effect on the quality of financial reports.*

***Keywords: implementation of government accounting standards, good governance, administration of fixed assets, regional financial supervision, quality of financial reports***

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, berkat Rahmat, Hidayah dan Karunia – Nya kepada kita semua, sehingga kami menyelesaikan skripsi dengan Judul **“ Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, *Good Governance*, Penatausahaan Aset Tetap dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota Tegal”.**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Binsis Universitas Pancasakti Tegal.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu dalam kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah membrikan kesehatan, kelancaran serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak dan Ibu saya yang telah mendoakan dan senantiasa memberikan bantuan, baik secara moral maupun material untuk kelancaran penelitian ini
3. Dr. Dien Novianty R., S.E, M.M, Akt. CA, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
4. Dr. Abdulloh Mubarok, S.E., M.M., Ak, C.A, Sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
5. Dr. Dewi Indriasih, S.E., M.M., Akt, sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, memberikan saran dan motivasi peneliti dalam penyusunan proposal penelitian untuk skripsi dengan baik.
6. Dr. Abdulloh Mubarok, S.E., M.M., Ak, C.A sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, memberikan saran dan motivasi peneliti dalam penyusunan proposal penelitian untuk skripsi dengan baik.
7. Yanti Puji Astuti, S.E., M.Si., CMA selaku dosen dosen wali yang telah memberikan motivasi serta membantu dalam segala akademis.
8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah meberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya.
9. Sahabat seperjuangan saya di Universitas Pancasakti Tegal yang telah memotivasi dan selalu membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat saya dan seseorang yang tidak bisa saya sebutkan namanya, yang selalu menemani saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kami menyadari skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, maka kami mengharapkan saran dan kritik demi skripsi ini.

Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak- pihak lain yang berkepentingan.

Tegal, 16 Juli 2024

Fadiya Nurarifiani

# DAFTAR ISI

**Halaman**

HALAMAN JUDUL **Error! Bookmark not defined.**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING **Error! Bookmark not defined.** HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI**Error! Bookmark not defined.** MOTTO DAN PERSEMBAHAN **Error! Bookmark not defined.**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**Error! Bookmark**

# not defined.

[ABSTRAK 6](#_bookmark0)

[ABSTRACT 7](#_bookmark1)

[KATA PENGANTAR 8](#_bookmark2)

[DAFTAR ISI 10](#_bookmark3)

[DAFTAR TABEL 13](#_bookmark4)

[DAFTAR GAMBAR 14](#_bookmark5)

[DAFTAR LAMPIRAN 15](#_bookmark6)

[BAB 1 16](#_bookmark7)

[PENDAHULUAN 16](#_bookmark8)

* 1. [Latar Belakang 16](#_bookmark9)
	2. [Rumusan Masalah 24](#_bookmark10)
	3. [Tujuan Penelitian 25](#_bookmark11)
	4. [Manfaat Penelitian 25](#_bookmark12)

[BAB II TINJAUAN PUSTAKA 27](#_bookmark13)

1. [Landasan Teori 27](#_bookmark14)
	1. [Teori Keagenan (Agency Theory) 27](#_bookmark15)
	2. [Kualitas Laporan Keuangan Daerah 28](#_bookmark16)
	3. [Standar Akuntansi Pemerintah 40](#_bookmark17)
	4. [Good Governance 44](#_bookmark18)
	5. [Penatausahaan Aset Tetap 53](#_bookmark19)
	6. [Pengawasan Keuangan Daerah 63](#_bookmark20)
2. Penelitian Terdahulu Error! Bookmark not defined.
3. [Kerangka Pemikiran Konseptual 63](#_bookmark21)
4. [Hipotesis 70](#_bookmark23)

[BAB III METODE PENELITIAN 71](#_bookmark24)

1. [Jenis Penelitian 71](#_bookmark25)
2. [Populasi dan Sampel 71](#_bookmark26)
3. [Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 72](#_bookmark28)
	1. [Definisi Konseptual 72](#_bookmark29)
	2. [Operasional Variabel 77](#_bookmark30)
4. [Metode Pengumpulan Data 80](#_bookmark32)
5. [Teknik Pengolahan Data 80](#_bookmark33)
6. [Metode Analisis Data 81](#_bookmark34)
	1. Statistik Deskriptif Error! Bookmark not defined.
	2. Uji Kualitas Data Error! Bookmark not defined.
	3. [Uji Asumsi Klasik 82](#_bookmark35)
	4. [Uji Regresi Linear Berganda 83](#_bookmark36)
	5. [Uji Hipotesis 84](#_bookmark37)

BAB IV 86

PEMBAHASAN 86

1. Gambaran Umum 86
	1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 86
2. Hasil Penelitian 87
	1. Karakteristik Responden 87
	2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 90
	3. Uji Statistik Deskriptif 95
	4. Uji Asumsi Klasik 96
	5. Analisis Regresi Berganda 99
	6. Uji Hipotesis 101
	7. Koefisien Determinasi 103
3. Pembahasan 104

BAB V 111

KESIMPULAN DAN SARAN 111

1. Kesimpulan 111
2. Saran 112

DAFTAR PUSTAKA **Error! Bookmark not defined.**

# DAFTAR TABEL

**Halaman**

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu **Error! Bookmark not defined.**

[Tabel 3. 1 Daftar Sampel 71](#_bookmark27)

[Tabel 3. 2 Operasional Variabel 77](#_bookmark31)

Tabel 4. 1 Daftar Responden **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.. **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 87

Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 88

Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 89

Tabel 4. 6 Uji Validitas Impelementasi Standar Akuntansi Pemerintah **Error!**

# Bookmark not defined.

Tabel 4. 7 Uji Validitas Good Governance 90

Tabel 4. 8 Uji Validitas Penatausahaan Aset Tetap **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 9 Uji Validitas Pengawasan Keuangan Daerah .**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 10 Uji Validitas Kualitas Laporan keuangan **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 11 Uji Reliabilitas **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 12 Hasil Uji Statistik Deskriptif 95

Tabel 4. 13 Hasil Uji Normalitas **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 14 Hasil Uji Multikolonieritas 97

Tabel 4. 15 Hasil Uji Heterokedastisitas 97

Tabel 4. 16 Hasil Uji Regresi Linear Berganda 100

Tabel 4. 17 Hasil Uji Kelayakan Model (F) 101

Tabel 4. 18 Hasil Uji Parsial (T) 102

Tabel 4. 19 Hasil Uji Koefisien Determinasi 104

# DAFTAR GAMBAR

[Gambar. 1 Kerangka Pemikiran Konseptual 69](#_bookmark22)

Gambar. 2 Uji Heteroskedastisitas 99

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. 1 Instrumen Penelitian **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran. 2 Tabulasi Kuisioner **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran. 3 Uji Validitas **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran. 4 Uji Reliabilitas **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran. 5 Uji Normalitas **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran. 6 Uji Multikolonieritas **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran. 7 Uji Heteroskedastisitas **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran. 8 Uji Analisis Berganda **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran. 9 Uji F **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran. 10 Uji T **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran. 11 Uji Koefisien Determinasi **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran. 12 Surat Ijin Penelitian **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran. 13 Bukti Tanda Pengembalian Kuisioner **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran. 14 Surat Balasan **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran. 15 Dokumentasi **Error! Bookmark not defined.**

# BAB 1

# PENDAHULUAN

# Latar Belakang

Dalam perjalanan waktu, akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan, terutama sejak era reformasi yang dimulai pada akhir abad ke-20. Perubahan ini terutama didorong oleh kebijakan pemerintah yang berorientasi pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Era reformasi membawa perubahan mendasar dalam cara pemerintah mengelola dan melaporkan keuangan publik, dengan fokus utama pada desentralisasi fiskal yang mengedepankan peran serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya keuangan.

Desentralisasi fiskal, sebagai salah satu aspek penting dari reformasi, mengalihkan sejumlah wewenang dan tanggung jawab keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran, sehingga dapat meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan dan prioritas lokal. Dengan desentralisasi ini, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih efisien dalam merespons tuntutan masyarakat dan mengelola sumber daya yang ada sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.

16

Perubahan ini menuntut adanya penyesuaian signifikan dalam sistem akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik yang dulu didasarkan pada prinsip-prinsip yang lebih sederhana kini harus mengadopsi standar yang lebih kompleks dan transparan. Standar akuntansi baru ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan publik dan memastikan bahwa informasi yang disajikan akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini termasuk penerapan prinsip akuntansi yang sesuai dengan standar internasional, serta pengembangan sistem pelaporan yang lebih sistematis dan terintegrasi.

Selain itu, reformasi juga mendorong adanya pembaruan dalam pengawasan dan akuntabilitas keuangan. Penguatan pengawasan internal dan eksternal, termasuk audit dan evaluasi berkala, menjadi hal yang krusial dalam memastikan bahwa pengelolaan anggaran dan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan yang ketat ini diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan, korupsi, dan ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran.

Dengan demikian, perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia pada era reformasi mencerminkan upaya untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Reformasi ini tidak hanya mencakup perubahan dalam kebijakan dan regulasi, tetapi juga melibatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang mendukung proses akuntansi dan pelaporan. Keseluruhan perubahan ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, responsif,

dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan negara, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional yang lebih baik. Setiap negara juga dituntut untuk dapat berkembang dan bersaing secara global agar mampu mencapai titik kemandirian pemerintahan, penerapan daya saing ini tentu dimulai dari hal yang paling mendasar yaitu pemerintah daerah (Rosana & Bharata, 2023). Pemerintah daerah diwajibkan melakukan laporan keuangan yang berkualitas, sehingga banyak yang bergantung pada informasi laporan keuangan yang di publikasikan pemerintah daerah untuk kepentingan yang berbeda-beda (Ikyarti & Aprilia, 2019)

Dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah merupakan pihak yang memegang amanah dan mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan dan melaporkan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawab pihak pemberi amanah, dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Tanggungjawab tersebut berupa laporan keuangan atas pengelolaan dana pemerintah yang tidak hanya pada pemerintah pusat tetapi juga kepada masyarakat luas (Widaningrum & Fahrian, 2023).

Pemerintah daerah diberi mandat untuk mengelola keuangan mereka selaras dengan tanggung jawab inti mereka dan rencana strategis yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan ini sangat penting untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah daerah. Pelaporan keuangan yang akurat sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang berfungsi sebagai komponen kunci tata pemerintahan yang baik (Rosana & Bharata, 2023).

Laporan keuangan pemerintah daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan laporan keuangan yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah naungan pemerintah tersebut. Kualitas dari laporan keuangan ini memainkan peran yang sangat penting dalam mencerminkan seberapa efektif pengelolaan keuangan yang dilakukan. Salah satu aspek penting dalam laporan keuangan adalah bagaimana aset tetap dicatat dan dilaporkan, yang biasanya tercermin dalam neraca keuangan.

Aset tetap, yang mencakup berbagai item seperti tanah, bangunan, peralatan, dan kendaraan, adalah bagian integral dari laporan keuangan yang memberikan gambaran mengenai kondisi dan nilai harta tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Jika laporan keuangan dapat menyajikan nilai aset tetap secara akurat, ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset tersebut dilakukan dengan baik. Sebaliknya, ketidakakuratan dalam pelaporan aset tetap atau penilaian yang tidak tepat bisa menjadi indikator adanya masalah dalam pengelolaan aset.

Pengelolaan aset tetap yang tidak memadai dapat berdampak langsung pada kualitas laporan keuangan. Misalnya, jika aset tetap tidak dikelola dengan baik—misalnya melalui pencatatan yang tidak tepat, penilaian yang salah, atau perawatan yang buruk—maka informasi yang tercantum dalam laporan keuangan akan menjadi kurang akurat. Hal ini dapat menimbulkan implikasi negatif terhadap laporan keuangan secara keseluruhan dan dapat merusak integritas serta keandalan data yang disajikan. Akibatnya, kesehatan keuangan pemerintah daerah pun bisa terpengaruh.

Ketika pengelolaan aset tetap dilakukan dengan buruk, ini dapat mengarah pada berbagai masalah seperti ketidakakuratan dalam penilaian nilai aset, kesulitan dalam pemeliharaan, atau bahkan potensi kerugian dari aset yang hilang atau rusak. Semua masalah ini, pada gilirannya, akan tercermin dalam laporan keuangan sebagai ketidaksesuaian atau kesalahan yang dapat merusak kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan tersebut.

Lebih jauh lagi, laporan keuangan yang berkualitas rendah akibat pengelolaan aset tetap yang buruk dapat mempengaruhi kesehatan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan. Hal ini karena laporan keuangan yang tidak akurat dapat memberikan gambaran yang salah tentang kondisi keuangan, yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan, perencanaan anggaran, dan alokasi sumber daya. Dalam konteks ini, kualitas laporan keuangan menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas manajemen keuangan di tingkat pemerintah daerah.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan keuangan OPD dikelola dengan baik dan disusun dengan cermat. Ini mencakup menjaga akurasi dalam pencatatan dan pelaporan aset tetap, melakukan penilaian yang tepat, serta memastikan adanya pemeliharaan yang baik terhadap aset. Dengan begitu, kualitas laporan keuangan akan lebih baik, yang pada gilirannya akan mendukung transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa kesehatan keuangan pemerintah daerah tetap terjaga dan dikelola dengan efektif. (Widiati et al., 2021).

Laporan keuangan adalah puncak dari proses akuntansi, memberikan informasi penting untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pemangku kepentingan. Laporan-laporan ini menggambarkan kinerja program dan kegiatan, realisasi target pendapatan, penyerapan pengeluaran, dan pembiayaan. Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyampaikan informasi tentang posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas, membantu pengguna dalam pengambilan keputusan dan mengevaluasi alokasi sumber daya (Zulkifli et al., 2023).

Laporan keuangan berkualitas tinggi sangat penting untuk menginformasikan keputusan kebijakan pemerintah di masa depan. Tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan rincian terkait mengenai status keuangan dan transaksi entitas pelapor selama jangka waktu tertentu. Untuk memastikan pengawasan keuangan yang efektif, proses penyusunan laporan keuangan daerah perlu disempurnakan. Agar informasi keuangan dianggap memuaskan, pemerintah daerah wajib mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam praktik pengelolaan keuangan mereka. (Murniati, 2021).

Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPK) yang bertugas sebagai auditor pemerintah melakukan evaluasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah setiap tahunnya. BPK mengeluarkan satu dari empat kemungkinan opini audit: Unqualified (WTP), Qualified with Exceptions (WDP), Adverse (TW), dan Disclaimer of Opinion (TMP). Di luar pendapat tersebut, kualitas laporan keuangan daerah juga dinilai berdasarkan kepatuhannya terhadap

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), keakuratan penyusunannya melalui sistem akuntansi pemerintah daerah, kepatuhannya terhadap peraturan hukum, dan penyajiannya yang tepat waktu sebagaimana diamanatkan oleh undang- undang (Vidyasari & Suryono, 2021).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan berkualitas tinggi harus memberikan informasi yang relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, dan dapat dimengerti. Laporan dianggap relevan jika membantu pengguna membuat keputusan dengan mengevaluasi peristiwa masa lalu, sekarang, atau masa depan. Mereka dianggap dapat diandalkan jika bebas dari kesalahan signifikan atau informasi yang menyesatkan, secara jujur mewakili fakta, dan dapat diverifikasi. Perbandingan memungkinkan pengguna untuk menganalisis kinerja keuangan di berbagai periode, sementara pemahaman memastikan bahwa informasi jelas bagi pengguna (Reinelda et al., 2022).

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah. Hubungan ini berakar pada teori keagenan, yang menunjukkan bahwa semakin dekat laporan keuangan daerah (LKPD) mengikuti pedoman SAP, semakin tinggi kualitasnya (Philadhelphia et al., 2020).

Faktor penting lainnya adalah penerapan good governance. Tata kelola yang baik, sebagaimana diterapkan oleh lembaga pemerintah, sangat penting untuk membangun kepercayaan terhadap kinerja pemerintah. Ketika prinsip-

prinsip tata kelola yang baik dipatuhi, ia menyusun kinerja staf keuangan, menyederhanakan proses penyusunan laporan keuangan daerah (Philadhelphia et al., 2020).

Pengelolaan aset tetap juga penting karena berdampak pada kualitas laporan keuangan dengan memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang dimiliki Pemerintah Daerah. Penyajian informasi yang memadai dan adil mengenai aset tetap, terutama dalam hal administrasinya, mengarah pada laporan keuangan berkualitas tinggi (Widiati et al., 2021).

Terakhir, pengawasan keuangan daerah memegang peranan penting. Pengawasan keuangan yang efektif memastikan bahwa pemerintah daerah beroperasi secara efisien dan sesuai dengan rencana dan ketentuan hukum, sehingga memperkuat kepercayaan terhadap kualitas laporan keuangan (Rahayu & Dewi, 2022).

Di Kota Tegal, fenomena yang menonjol adalah pencapaian Unqualified Opinion (WTP) secara terus-menerus selama enam tahun berturut- turut, dari tahun 2018 hingga 2023, yang menunjukkan standar tertinggi hasil audit Laporan Keuangan Daerah. Terlepas dari keberhasilan ini, Penjabat Walikota Tegal menekankan perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Tegalkota.go.id, 2024).

Studi ini dilatarbelakangi oleh inkonsistensi temuan penelitian sebelumnya. Misalnya, Azlim dkk. (2012) menemukan bahwa standar akuntansi pemerintah mempengaruhi kualitas laporan keuangan, sedangkan

Ariyanti & Ningsih (2023) melaporkan tidak ada pengaruh tersebut. Di sisi lain, Ariyanti & Ningsih (2023) mengidentifikasi hubungan positif antara tata kelola yang baik dan kualitas laporan keuangan. Zulkifli dkk. (2023) menegaskan bahwa administrasi aset tetap mempengaruhi kualitas laporan keuangan, dan Rahayu & Dewi (2022) menyoroti pentingnya pengawasan keuangan daerah dalam hal ini.

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, penulis termotivasi untuk mengambil judul **“Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, *Good Governance*, Penatausahaan Aset Tetap, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota Tegal (Studi Kasus Pada Opd Kota Tegal)”.**

# Rumusan Masalah

Merefleksikan latar belakang yang diberikan, pertanyaan penelitian untuk penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

* + 1. Bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berdampak pada kualitas laporan keuangan daerah Kota Tegal?
		2. Bagaimana penerapan good governance mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah Kota Tegal?
		3. Apa pengaruh manajemen aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kota Tegal?
		4. Bagaimana pengawasan keuangan daerah mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Tegal?

# Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mencapai tujuan berikut:

* + 1. Untuk mengetahui dampak penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kota Tegal.
		2. Untuk menilai pengaruh praktik tata kelola yang baik terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kota Tegal.
		3. Untuk mengevaluasi pengaruh manajemen aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kota Tegal.
		4. Untuk menganalisis dampak pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kota Tegal.

# Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari penjabaran tujuan penelitian diatas, diinginkan penelitian ini mampu menghasilkan manfaat yang diperoleh yakni sebagai berikut:

* + 1. Manfaat Teoritis

Diantisipasi bahwa temuan studi ini akan memberikan kontribusi pada pengembang ilmu ekonomi untuk sumber bacaan ataupun referensi yang menujukkan informasi mengenai variabel bebas guna pada pihak yang ingin meneliti ulang atau lanjut dengan pengambilan salah satu variabel tersebut terhadap kualitas laporan keuangan dan memperkaya literatur yang sudah ada.

* + 1. Manfaat Praktis
			1. Untuk Peneliti

Diperkirakan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan keahlian peneliti, menawarkan mereka wawasan berharga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara pemahaman teoritis dan aplikasi praktis.

* + - 1. Untuk Pemerintah

Temuan dari studi ini dimaksudkan untuk berfungsi sebagai referensi dan sumber informasi mengenai standar dan praktik laporan keuangan daerah berkualitas tinggi, khususnya dalam pengelolaan keuangan lembaga pemerintah daerah.

* + - 1. Untuk Publik

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, sehingga mendukung penilaian publik terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan.

# BAB II TINJAUAN PUSTAKA

# Landasan Teori

* 1. **Teori Keagenan *(Agency Theory)***

Teori agensi, sebagaimana diuraikan oleh Jensen dan Meckling (1976) dan dirujuk oleh Ghozali (2020:86), menggambarkan dinamika antara prinsipal dan agen. Dalam konteks organisasi sektor publik, teori ini menyoroti bahwa pemerintah, yang bertindak sebagai agen, bertanggung jawab mengelola, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas, termasuk pengelolaan sumber daya keuangan, kepada masyarakat utama. Kepala sekolah berhak menuntut pertanggungjawaban atas kegiatan tersebut (Philadhelphia et al., 2020).

Menurut teori keagenan, hubungan antara pemerintah (agen) dan masyarakat (principal) dapat menimbulkan konflik jika tindakan agen tidak sesuai dengan harapan prinsipal, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan menimbulkan biaya tambahan. Biaya keagenan ini timbul dari perlunya komunikasi dan negosiasi lebih lanjut untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai pengelolaan sumber daya regional yang efektif, yang menguntungkan kedua belah pihak (Zubaidah & Nugraeni, 2023).

Dalam ranah pelaporan keuangan, teori keagenan menggarisbawahi peran pemerintah sebagai agen yang diberi tanggung jawab untuk mengungkapkan secara transparan semua informasi yang

relevan kepada pemangku kepentingan. Transparansi ini sangat penting untuk mengevaluasi akuntabilitas dan membuat keputusan berdasarkan informasi mengenai kebijakan sosial, politik, dan ekonomi (Pirani et al., 2023).

Teori ini juga menghubungkan transparansi dan akuntabilitas dengan kualitas laporan keuangan. Tata kelola yang efektif, ditandai dengan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dan meningkatkan efisiensi pelaporan keuangan oleh pejabat pemerintah (Samsiah et al., 2023).

# Kualitas Laporan Keuangan Daerah

* + 1. **Pengertian Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut Mahmudi (2019:1), laporan keuangan sangat penting bagi penyedia layanan publik, karena mereka perlu menawarkan informasi berkualitas tinggi bagi pengguna. Laporan keuangan yang efektif harus memberikan wawasan yang relevan mengenai status entitas layanan publik untuk periode tertentu, yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan di masa depan. Laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan akuntabilitas pengelola keuangan untuk tahun anggaran yang bersangkutan (Widaningrum & Fahrian, 2023).

Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan berharga bagi penggunanya. Administrasi yang tidak efisien atau kekurangan dalam

pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah sering kali terlihat dalam laporan-laporan ini. Laporan keuangan berkualitas adalah yang berdampak signifikan terhadap pengambilan keputusan, dengan informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bermanfaat bagi pemangku kepentingan yang mengandalkan data ekonomi daerah (Hidayat dkk., 2021).

Laporan keuangan memainkan peran penting dalam mendokumentasikan status keuangan suatu entitas untuk periode tertentu. Mahmudi (2019:67) menguraikan komponen kunci dari laporan keuangan sebagai berikut:

* + - 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan dokumen yang sangat penting dalam sistem akuntansi sektor publik, berfungsi untuk menyajikan ringkasan mendetail mengenai sumber dan alokasi dana yang tersedia selama periode pelaporan tertentu. Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana anggaran yang telah direncanakan diimplementasikan dalam praktik, dengan menampilkan perbandingan yang jelas antara jumlah anggaran yang telah ditetapkan dan realisasi aktual dari anggaran tersebut. Dalam LRA, berbagai komponen utama dari pengelolaan keuangan publik dipaparkan secara rinci. Pertama, laporan ini mencakup rincian tentang pendapatan yang diperoleh oleh entitas pemerintah selama periode

pelaporan. Pendapatan ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti pajak, sumbangan, dan pendapatan lain yang sah. Selanjutnya, laporan ini juga menyajikan informasi mengenai pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah, yang meliputi belanja operasional, investasi, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk menjalankan berbagai fungsi dan layanan publik. Tidak hanya itu, LRA juga mencakup informasi mengenai transfer, yaitu dana yang dipindahkan dari satu entitas pemerintah ke entitas lainnya, baik itu dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau sebaliknya. Transfer ini sering kali melibatkan dana alokasi khusus atau bantuan yang dimaksudkan untuk mendukung program-program tertentu atau mengatasi kebutuhan khusus di berbagai daerah. Selain pendapatan, pengeluaran, dan transfer, LRA juga menyajikan data mengenai pembiayaan, yang mencakup sumber dana yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran atau membiayai proyek-proyek tertentu. Pembiayaan ini bisa berasal dari pinjaman, penerbitan obligasi, atau sumber pembiayaan lainnya yang diperoleh untuk mendukung kegiatan-kegiatan pemerintah. Laporan Realisasi Anggaran memberikan perbandingan yang terperinci antara anggaran yang telah ditetapkan dan realisasi aktual dari alokasi dana tersebut. Dengan membandingkan anggaran yang

direncanakan dengan implementasi yang terjadi, laporan ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi sejauh mana perencanaan keuangan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Hal ini juga membantu dalam mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian atau variansi antara anggaran yang direncanakan dan realisasi aktual, yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran di masa depan. Secara keseluruhan, Laporan Realisasi Anggaran memainkan peran krusial dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Dengan menyajikan informasi yang lengkap dan akurat tentang pendapatan, pengeluaran, transfer, dan pembiayaan, laporan ini tidak hanya membantu dalam pemantauan dan evaluasi kinerja keuangan, tetapi juga dalam memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan prioritas yang telah ditetapkan.

* + - 1. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Berlebih (SAL) adalah dokumen yang menyajikan rincian mendalam mengenai pergerakan saldo anggaran yang melebihi anggaran yang telah ditetapkan untuk tahun berjalan, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana saldo anggaran yang berlebih

berubah dari satu tahun ke tahun berikutnya, serta faktor- faktor yang mempengaruhi fluktuasi tersebut. Dalam laporan ini, berbagai elemen penting dipaparkan secara rinci. Pertama-tama, laporan ini mencatat saldo anggaran berlebih pada awal tahun berjalan, yang merupakan sisa dari saldo anggaran tahun sebelumnya. Selanjutnya, laporan ini menggambarkan bagaimana saldo tersebut berfluktuasi sepanjang tahun berjalan, mencakup penambahan atau pengurangan yang terjadi selama periode tersebut. Fluktuasi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan dalam pendapatan atau pengeluaran yang tidak terduga, pergeseran dalam prioritas anggaran, atau perubahan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi alokasi dana. Selain itu, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Berlebih juga menyajikan perbandingan antara saldo anggaran berlebih untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Perbandingan ini penting untuk mengevaluasi apakah terdapat perubahan signifikan dalam pengelolaan anggaran yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan secara keseluruhan. Dengan membandingkan saldo anggaran berlebih tahun ini dengan saldo tahun lalu, laporan ini membantu dalam mengidentifikasi tren, pola, atau anomali yang mungkin memerlukan perhatian atau penanganan khusus. Laporan ini

juga menguraikan penyebab-penyebab perubahan dalam saldo anggaran berlebih, seperti perubahan dalam penerimaan atau pengeluaran yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini termasuk faktor-faktor seperti fluktuasi dalam pendapatan yang diterima, misalnya dari pajak atau sumbangan, serta perubahan dalam pengeluaran yang dapat disebabkan oleh variansi dalam biaya operasional, proyek-proyek baru, atau kebutuhan mendesak yang tidak terduga. Dengan menyediakan informasi terperinci mengenai fluktuasi saldo anggaran berlebih, laporan ini berfungsi sebagai alat yang berguna untuk analisis dan perencanaan keuangan. Laporan ini memungkinkan para pengelola keuangan dan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi dampak dari berbagai faktor terhadap saldo anggaran, serta untuk mengidentifikasi area-area yang mungkin memerlukan penyesuaian atau tindakan korektif. Secara keseluruhan, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Berlebih merupakan elemen penting dalam sistem akuntansi publik yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Dengan menyajikan rincian yang komprehensif tentang bagaimana saldo anggaran berlebih berubah dari tahun ke tahun, laporan ini membantu dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan cara yang efektif dan sesuai

dengan anggaran yang telah ditetapkan, serta memberikan dasar yang solid untuk perencanaan dan pengambilan keputusan di masa depan.

* + - 1. Dokumen ini menyajikan informasi yang komprehensif mengenai tiga komponen utama yang mendefinisikan kondisi keuangan entitas, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Pertama- tama, neraca menguraikan aset yang dimiliki oleh entitas. Aset adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh entitas yang memiliki nilai ekonomis dan dapat memberikan manfaat di masa depan. Selanjutnya, neraca merinci kewajiban yang dimiliki oleh entitas. Kewajiban adalah kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh entitas kepada pihak ketiga. Seperti halnya aset, kewajiban juga dikategorikan menjadi dua jenis: Ekuitas menggambarkan nilai residual yang tersisa bagi pemilik entitas setelah semua kewajiban dipenuhi. Ekuitas mencakup modal saham, cadangan, laba ditahan, dan elemen lain yang mencerminkan kontribusi pemilik dan hasil operasi entitas yang belum dibagikan sebagai dividen. Dengan kata lain, ekuitas menunjukkan kepemilikan pemegang saham atas entitas dan mencerminkan seberapa besar aset yang telah dibiayai oleh modal pemilik dibandingkan dengan kewajiban yang harus ditanggung. Neraca disusun pada titik waktu tertentu, memberikan snapshot dari posisi keuangan entitas

pada tanggal tertentu, yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai kesehatan finansial entitas pada waktu itu. Dengan menyediakan informasi terperinci tentang aset, kewajiban, dan ekuitas, neraca berfungsi sebagai alat penting untuk analisis keuangan, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Neraca juga membantu dalam menilai likuiditas, solvabilitas, dan struktur modal entitas, yang merupakan aspek kunci dalam mengevaluasi stabilitas dan efisiensi operasional. Secara keseluruhan, neraca memainkan peran yang sangat vital dalam laporan keuangan suatu entitas, memberikan wawasan yang mendalam mengenai posisi keuangan dan membantu berbagai pihak dalam membuat keputusan yang lebih informasi dan strategis.

* + - 1. Laporan Operasional adalah dokumen penting yang memberikan ringkasan mendalam tentang bagaimana sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, digunakan dan dikelola dalam konteks administratif selama periode pelaporan tertentu. Laporan ini berfungsi untuk menyajikan informasi yang komprehensif mengenai alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang berkontribusi terhadap ekuitas entitas tersebut, dan memberikan gambaran tentang efektivitas serta efisiensi pengelolaan sumber daya

tersebut. Dalam laporan ini, berbagai elemen utama diuraikan dengan jelas. Pertama-tama, laporan ini mengidentifikasi dan merinci berbagai sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah. Sumber daya ini meliputi aset finansial, seperti kas, piutang, dan investasi, serta aset non-finansial yang dapat mencakup infrastruktur, peralatan, dan properti. Informasi mengenai sumber daya ini mencakup bagaimana sumber daya tersebut diperoleh, dikelola, dan digunakan untuk memenuhi tujuan administratif yang telah ditetapkan oleh entitas pemerintah. Selanjutnya, Laporan Operasional juga memaparkan bagaimana sumber daya ekonomi tersebut dikelola dalam konteks administratif. Ini mencakup bagaimana alokasi anggaran dilakukan, bagaimana dana dibelanjakan, serta bagaimana pengelolaan dan pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Laporan ini mencerminkan proses administratif yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya, serta mengevaluasi sejauh mana kegiatan administratif tersebut mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Laporan ini juga menyajikan informasi mengenai kontribusi sumber daya ekonomi terhadap ekuitas entitas. Ekuitas di sini merujuk pada nilai residu yang tersisa setelah dikurangi

kewajiban dari total aset, yang mencerminkan seberapa besar sumber daya ekonomi yang berhasil dikelola dan dioptimalkan untuk mendukung kestabilan keuangan dan pencapaian tujuan administratif. Dengan kata lain, laporan ini membantu dalam menilai dampak dari pengelolaan sumber daya terhadap kekuatan finansial dan integritas administrasi entitas pemerintah. Selain itu, Laporan Operasional sering kali mencakup analisis tentang efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. Ini termasuk evaluasi tentang bagaimana sumber daya digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan, seberapa baik pengelolaan administratif dilakukan, dan apakah terdapat pemborosan atau ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta untuk memberikan dasar bagi perbaikan berkelanjutan dalam praktik pengelolaan sumber daya. Secara keseluruhan, Laporan Operasional berperan sebagai alat evaluasi yang krusial dalam sistem akuntansi publik. Dengan memberikan ikhtisar yang rinci tentang pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, laporan ini membantu para pemangku kepentingan dalam memahami bagaimana sumber daya tersebut berkontribusi terhadap ekuitas dan tujuan administratif. Selain itu, laporan

ini juga mendukung transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan publik.

* + - 1. Pernyataan Arus Kas: Pernyataan ini merinci transaksi tunai yang terkait dengan aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan, menyajikan saldo awal, arus masuk, arus keluar, dan saldo kas akhir untuk periode tersebut.
			2. Equity Change Report (LPE): Laporan ini melacak perubahan ekuitas dari satu tahun ke tahun berikutnya.

# Pengukuran Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Mahmudi (2019:11), atribut kualitatif laporan keuangan merupakan kriteria normatif yang penting untuk memastikan bahwa informasi akuntansi memenuhi tujuan yang dimaksudkan. Empat karakteristik berikut dianggap mendasar bagi laporan keuangan pemerintah untuk mencapai tingkat kualitas yang diinginkan:

* + - 1. Relevansi: Laporan keuangan dianggap relevan jika informasi yang mereka berikan dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu dalam evaluasi peristiwa masa lalu atau saat ini dan meramalkan hasil di masa depan, sementara juga mengkonfirmasi atau menyesuaikan penilaian masa lalu. Informasi keuangan yang relevan ditandai dengan:
				1. Feedback Value: Kemampuan informasi untuk membantu pengguna memvalidasi atau merevisi harapan mereka sebelumnya.
				2. Nilai Prediktif: Kegunaan informasi dalam meramalkan kondisi masa depan berdasarkan data historis dan keadaan saat ini.
				3. Ketepatan waktu: Penyajian informasi pada waktu yang tepat untuk memastikan efektivitas dan kegunaannya dalam pengambilan keputusan.
				4. Kelengkapan: Dimasukkannya semua informasi yang diperlukan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, dengan pengungkapan rinci untuk meminimalkan kesalahan pengguna.
			2. Dapat diandalkan meskipun relevan, tidak boleh menyesatkan karena sifat atau penyajiannya. Hal ini didefinisikan oleh:
				1. Presentasi Jujur: Penggambaran akurat transaksi dan peristiwa yang wajar diharapkan untuk disajikan.
				2. Verifiability: Kemampuan untuk menguji informasi melalui beberapa evaluasi independen, menghasilkan kesimpulan yang konsisten.
				3. Netralitas: Informasi harus tidak memihak, melayani kebutuhan umum daripada mendukung kepentingan tertentu.
			3. Hal ini mengasumsikan bahwa pengguna memahami konteks operasional entitas pelapor dan siap untuk terlibat dengan informasi yang disajikan.

# Standar Akuntansi Pemerintah

* + 1. **Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah**

Transisi menuju penerapan standar akuntansi berbasis akrual, sebagaimana diatur dalam peraturan ini, bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas serta kejelasan informasi keuangan yang disajikan oleh entitas pemerintah. Peralihan ini mencerminkan upaya untuk menggantikan pendekatan akuntansi berbasis kas yang sebelumnya digunakan dengan metode akuntansi berbasis akrual yang lebih komprehensif dan akurat.

Standar akuntansi berbasis akrual dirancang untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dan tepat mengenai posisi keuangan dan hasil operasi entitas. Berbeda dengan akuntansi berbasis kas yang hanya mencatat transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan, akuntansi berbasis akrual mencatat transaksi ketika mereka terjadi, tanpa mempedulikan kapan kas masuk atau keluar. Pendekatan ini memungkinkan pengakuan pendapatan dan beban pada saat mereka benar-benar terjadi, sehingga memberikan informasi yang lebih akurat dan relevan tentang kewajiban dan hak entitas pada waktu tertentu.

Dengan mengadopsi standar akuntansi berbasis akrual, laporan keuangan dapat mencerminkan keadaan ekonomi yang sebenarnya dari entitas, termasuk nilai aset dan kewajiban yang mungkin belum direalisasikan secara tunai tetapi memiliki dampak signifikan terhadap kondisi keuangan. Misalnya, pendapatan yang diakui pada saat terjadi tetapi belum diterima secara tunai, serta beban yang timbul meskipun belum dibayar, akan tercatat dalam laporan keuangan. Hal ini memberikan pemangku kepentingan, seperti pengelola anggaran, investor, dan masyarakat, pandangan yang lebih lengkap tentang kesehatan keuangan entitas.

Keputusan untuk beralih ke standar akuntansi berbasis akrual juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan. Dengan mencatat transaksi pada saat terjadinya, laporan keuangan berbasis akrual membantu mengurangi potensi manipulasi dan memberikan informasi yang lebih jelas dan tepat waktu. Ini sangat penting dalam konteks pemerintahan, di mana kejelasan informasi keuangan berkontribusi pada akuntabilitas dan pengelolaan yang lebih baik.

Selain itu, standar akuntansi berbasis akrual memungkinkan perbandingan yang lebih baik antara periode keuangan yang berbeda, karena memberikan basis yang konsisten untuk pengakuan pendapatan dan beban. Hal ini mempermudah analisis kinerja keuangan dari waktu ke waktu dan memungkinkan identifikasi tren

serta pola yang relevan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan.

Adopsi standar akuntansi berbasis akrual juga dapat memperbaiki kualitas pengelolaan aset dan kewajiban, dengan memastikan bahwa semua aspek keuangan yang relevan dicatat secara akurat dan tepat waktu. Ini mencakup pengelolaan utang dan piutang, pengakuan aset tetap, dan penilaian kewajiban jangka panjang. Melalui pendekatan ini, entitas dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih lengkap dan informatif, mendukung pengelolaan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi.

Secara keseluruhan, peralihan ke standar akuntansi berbasis akrual di bawah peraturan ini adalah langkah strategis yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas informasi keuangan yang disajikan. Dengan menyediakan gambaran yang lebih akurat dan menyeluruh mengenai posisi keuangan dan hasil operasi, standar ini berkontribusi pada pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan mendukung pembuatan keputusan yang lebih baik serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya. (Hendra & Amirudin, 2020)

# Pengukuran Standar Akuntansi Pemerintah

* + - 1. Nomor PSAP. 04: Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan tersebut memberikan penjelasan rinci yang harus dapat dimengerti oleh semua pembaca, bukan hanya manajemen entitas. Catatan-catatan ini harus disusun secara sistematis.

* + - 1. Nomor PSAP. 05: Akuntansi Persediaan

Persediaan diakui ketika manfaat ekonomi masa depan diantisipasi, dan nilai atau biayanya dapat diukur secara andal. Persediaan dicatat pada saat diterima atau pada saat pengalihan hak kepemilikan dan/atau pengendalian.

* + - 1. Nomor PSAP. 06: Akuntansi Investasi

Investasi diakui jika memenuhi kriteria seperti potensi manfaat ekonomi dan sosial di masa depan bagi pemerintah, dan perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur secara akurat. Pengeluaran investasi jangka pendek dicatat sebagai pengeluaran tunai, sedangkan investasi jangka panjang dikategorikan sebagai pengeluaran pembiayaan.

* + - 1. Nomor PSAP. 07: Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap dikategorikan berdasarkan sifat kegiatan entitas, termasuk tanah, mesin, bangunan, jalan, dan proyek konstruksi. Mereka diakui ketika manfaat ekonomi masa depan dapat direalisasikan dan nilainya dapat diukur secara andal.

* + - 1. Nomor PSAP. 09: Akuntansi Tanggung Jawab

Kewajiban diakui ketika ada kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban, dan nilai penyelesaian dapat diukur secara andal.

## Good Governance

* + 1. **Pengertian *Good Governance***

Menurut Reydonnyzar (2019:58) *Governance* bisa diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik dengan prinsip keterbukaan dan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga menghasilkan tujuan organisasi yang sesuai. Good governance mengacu pada praktik dan prinsip-prinsip pengelolaan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja sektor publik dengan cara yang bersinergi, memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal, dan menerapkan tata kelola kepemerintahan yang baik. Konsep ini menekankan pentingnya pengelolaan yang efektif dan efisien dalam mengatur urusan publik, sehingga dapat menciptakan hasil yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Dalam konteks good governance, fokus utama adalah pada bagaimana sektor publik dikelola dengan cara yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan pemerintahan secara optimal. Ini mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengelolaan

sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik itu sumber daya manusia, finansial, maupun material. Dengan mengelola sumber daya tersebut dengan baik, pemerintah dapat memaksimalkan manfaat yang diperoleh dan mengurangi pemborosan serta inefisiensi dalam proses administrasi.

Salah satu elemen yang sangat penting dalam konsep good governance adalah penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar bagi pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta mendukung terwujudnya tata kelola yang adil dan bertanggung jawab.

Transparansi adalah prinsip utama dalam good governance yang menjamin bahwa seluruh proses pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Dengan adanya transparansi, masyarakat tidak hanya dapat mengetahui bagaimana dana publik dikelola, tetapi juga bisa memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah secara langsung. Hal ini menciptakan lingkungan di mana keputusan-keputusan penting dan alokasi sumber daya dilakukan dengan jelas, dan setiap langkah yang diambil oleh pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat. Transparansi ini juga berfungsi untuk mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang, karena setiap tindakan pemerintah akan menjadi bagian dari catatan publik yang dapat diperiksa.

Akuntabilitas merupakan prinsip lain yang sangat penting dalam tata kelola yang baik. Prinsip ini menuntut bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas semua tindakan dan keputusan yang diambilnya. Akuntabilitas berarti bahwa pemerintah harus siap untuk memberikan penjelasan yang jelas dan laporan yang terperinci kepada publik mengenai kebijakan, program, dan penggunaan anggaran. Hal ini mencakup tanggung jawab untuk menjelaskan alasan di balik keputusan-keputusan yang dibuat, serta hasil yang dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan akuntabilitas, masyarakat dapat menilai sejauh mana pemerintah memenuhi tanggung jawabnya dan sejauh mana keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan publik.

Partisipasi adalah prinsip yang mengharuskan adanya keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat memastikan bahwa suara dan kebutuhan warga diperhitungkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Melalui partisipasi, masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan, berkontribusi pada diskusi, dan mempengaruhi keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Prinsip ini memperkuat legitimasi keputusan pemerintah dan meningkatkan rasa kepemilikan serta dukungan terhadap kebijakan yang diterapkan. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan,

pemerintah dapat memperoleh perspektif yang lebih luas dan mendalam tentang kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan efektif.

Responsivitas adalah prinsip yang berfokus pada kemampuan pemerintah untuk merespons dengan cepat dan efektif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ini mencakup kemampuan untuk menangani keluhan, menanggapi permintaan, dan memperbaiki kebijakan atau tindakan berdasarkan umpan balik dari publik. Responsivitas memastikan bahwa pemerintah tidak hanya beroperasi dalam kerangka waktu dan prosedur yang telah ditetapkan, tetapi juga mampu beradaptasi dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas dalam good governance berkontribusi pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, adil, dan bertanggung jawab. Dengan prinsip-prinsip ini, pemerintahan dapat mengelola sumber daya secara lebih efektif, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Responsivitas berarti bahwa pemerintah harus peka terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta mampu memberikan solusi yang sesuai dengan tuntutan dan harapan mereka.

Good governance juga menekankan pada pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan urusan publik. Efisiensi mengacu pada kemampuan pemerintah untuk menggunakan sumber daya yang tersedia dengan cara yang paling optimal, mengurangi pemborosan, dan memastikan bahwa setiap unit anggaran memberikan hasil yang maksimal. Efektivitas, di sisi lain, berkaitan dengan sejauh mana kebijakan dan program pemerintah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan sektor publik. Sinergi antara berbagai elemen dalam sektor publik—termasuk lembaga pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat—merupakan kunci dalam memastikan bahwa pengelolaan sumber daya dilakukan secara harmonis dan berkelanjutan. Hal ini pada akhirnya akan mendukung tercapainya pemerintahan yang lebih baik, di mana setiap keputusan dan kebijakan didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan berorientasi pada hasil yang bermanfaat bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, good governance merupakan pendekatan komprehensif dalam mengelola urusan publik yang menekankan pada efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan fokus pada prinsip-prinsip ini, pemerintah dapat memastikan bahwa

pengelolaan sumber daya dilakukan dengan cara yang terbaik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan negara.

Konsep ini mencakup berbagai aspek, seperti pengambilan keputusan, pengelo laan sumber daya, dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, *governance* juga seringkali dihubungkan dengan konsep *good governance* atau tata kelola yang baik. *Good governance* menekankan pentingnya transparansi, partisipasi, akuntabiitas, dan responsivitas dalam pengelolaan urusan publik (Indriasih et al., 2022). Dengan menekankan prinsip-prinsip *good governance,* pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi korupsi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya.

Tata kelola yang baik berfungsi sebagai kerangka kerja yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan ekonomi untuk mencapai administrasi daerah yang efektif. Hal ini sangat penting dalam proses pembangunan daerah, dan memainkan peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan tujuan yang direncanakan. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah daerah harus mengelola sumber daya dalam yurisdiksinya dengan baik, termasuk sumber daya manusia, aset alam, dan infrastruktur. Pengelolaan keuangan merupakan komponen penting dalam pengelolaan sumber daya ini dan sangat penting untuk mencapai keberhasilan pembangunan daerah.

Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien merupakan hal mendasar bagi tata kelola yang baik. Tanpa itu, program pembangunan mungkin menghadapi tantangan seperti pendanaan yang tidak mencukupi, alokasi yang tidak efisien, atau bahkan pemborosan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang cermat untuk mengoptimalkan penggunaan dana dan menyelaraskan pengeluaran dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Pemerintahan yang baik juga memerlukan adanya perencanaan yang matang dan strategi yang jelas dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan yang efektif sangat penting bagi pemerintah daerah karena mengarahkan penentuan prioritas pembangunan, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, dan menguraikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan. Pengelolaan sumber daya yang tepat, termasuk sumber daya keuangan, sangat penting untuk memastikan bahwa rencana ini berhasil dilaksanakan.

Kualitas pengelolaan keuangan di tingkat daerah sangat mempengaruhi keberhasilan inisiatif pembangunan, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Transparansi dalam praktik

keuangan memungkinkan pemantauan dan audit transaksi dan pemanfaatan dana dengan mudah. Akuntabilitas memastikan bahwa kegiatan keuangan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas keputusan mereka. Efisiensi berkaitan dengan penyebaran sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil tanpa pemborosan.

Dengan mengelola keuangan dan sumber daya lainnya secara efektif, pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensinya dan memastikan bahwa pembangunan daerah selaras dengan tujuan yang direncanakan. Pencapaian tujuan pembangunan tidak hanya bergantung pada perencanaan yang kuat namun juga pada pelaksanaan yang terampil dan pengelolaan yang cermat atas semua sumber daya yang tersedia. Peningkatan kualitas manajemen secara terus-menerus diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan berkontribusi untuk mencapai hasil yang optimal bagi masyarakat dan wilayah.

Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif, terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Tata kelola yang baik sangat penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan memastikan bahwa upaya tersebut memberikan manfaat besar bagi kemajuan dan kesejahteraan daerah. Menurut Agustiningtyas & Tyasari (2020), good governance adalah sistem yang mengatur

interaksi antara pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan administrasi yang transparan, efektif, dan efisien sejalan dengan aspirasi masyarakat sipil yang sejahtera dan mandiri. Penerapan tata pemerintahan yang baik merupakan tanggung jawab kolektif, yang tidak hanya melibatkan pemerintah namun seluruh pemangku kepentingan dalam kerangka tata kelola.

Dalam konteks bisnis dan dunia usaha, diharapkan dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* dalam menjalankan aktivitasnya, seperti berkomitmen pada etika bisnis yang baik dan menjaga keberlangsungan lingkungan.

* + 1. **Tujuan dan Manfaat *Good Governance***

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik harus melibatkan ketiga pilar dengan proses yang strategis dan konstruktif antar ketiganya.

* + 1. **Pengukuran *Good Governance***
			1. Akuntabilitas
			2. Transparansi
			3. Penetapan Hukum
			4. Responsivitas
			5. Efisien dan Efektif

# Penatausahaan Aset Tetap

* + 1. **Pengertian Penatausahaan Aset Tetap**

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 16, aset tetap didefinisikan sebagai sumber daya yang digunakan dalam menyediakan barang dan jasa kepada pihak ketiga atau untuk tujuan administratif, dengan perkiraan penggunaan yang melampaui satu periode akuntansi. Pada dasarnya, aset tetap adalah aset yang masa manfaatnya melebihi satu tahun dan tidak habis atau habis dalam satu siklus akuntansi. Contoh aset tetap mencakup tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan kendaraan, yang semuanya penting bagi fungsi operasional suatu entitas. Aset ini dikategorikan sebagai investasi jangka panjang di neraca, dan nilai bukunya terdepresiasi seiring waktu dan penggunaan.

Sebaliknya, pengelolaan barang milik negara atau daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, yang menguraikan tata cara penanganan barang tersebut. Peraturan ini mengamanatkan bahwa pengelolaan properti negara atau daerah melibatkan beberapa kegiatan utama termasuk pembukuan, pengelolaan inventaris, dan pelaporan. Pembukuan memerlukan pencatatan secara sistematis semua transaksi yang berkaitan dengan properti negara bagian atau regional dalam buku besar yang sesuai untuk memastikan dokumentasi yang akurat dari setiap akuisisi, pengeluaran, dan pengalihan aset. Inventarisasi adalah kegiatan pengumpulan data dan pembuatan daftar

lengkap barang milik negara atau daerah, yang bertujuan untuk memverifikasi dan memastikan keberadaan serta kondisi barang-barang tersebut. Sedangkan pelaporan adalah proses penyampaian informasi mengenai status dan kondisi barang milik negara atau daerah kepada pihak-pihak terkait, seperti lembaga pemeriksa dan pengawas.

Dalam konteks pengelolaan barang milik negara atau daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 berfungsi sebagai pedoman teknis yang penting untuk menetapkan bagaimana barang-barang tersebut harus diadministrasikan. Peraturan ini memberikan rincian dan arahan yang mendalam mengenai langkah- langkah yang perlu diambil agar pengelolaan barang milik negara atau daerah dapat dilakukan dengan baik. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa barang-barang yang menjadi milik negara atau daerah dikelola dengan cara yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pedoman ini mencakup berbagai aspek yang krusial dalam proses penatausahaan, yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang. Dengan kata lain, peraturan ini menetapkan standar dan prosedur yang harus diikuti untuk memastikan bahwa setiap tahap pengelolaan barang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam hal ini, pembukuan barang melibatkan pencatatan seluruh transaksi yang berkaitan dengan barang milik negara atau daerah, termasuk pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan barang tersebut. Proses ini bertujuan

untuk memastikan bahwa semua informasi terkait barang tercatat dengan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain pembukuan, inventarisasi juga merupakan komponen penting dari pedoman ini. Inventarisasi melibatkan proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pencatatan semua barang milik negara atau daerah yang ada pada saat tertentu. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk memiliki catatan yang jelas mengenai jumlah dan kondisi barang yang dimiliki, serta untuk melakukan pengecekan secara berkala terhadap keberadaan dan kondisi barang tersebut. Proses inventarisasi yang teratur membantu mencegah kehilangan atau penyalahgunaan barang serta memastikan bahwa barang yang tercatat dalam laporan sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.

Pelaporan juga menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam pedoman ini. Peraturan ini menetapkan bagaimana laporan mengenai barang milik negara atau daerah harus disusun dan disampaikan. Laporan ini harus mencakup informasi yang relevan dan detail mengenai status barang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, serta bagaimana barang-barang tersebut dikelola selama periode pelaporan. Proses pelaporan yang transparan dan akurat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengelolaan barang, serta memastikan bahwa informasi yang disajikan kepada publik dan pihak-pihak terkait adalah tepat dan dapat dipercaya.

Secara keseluruhan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 berfungsi sebagai panduan komprehensif untuk pengelolaan barang milik negara atau daerah, dengan memberikan instruksi yang jelas tentang bagaimana langkah-langkah penatausahaan harus dilakukan. Dengan mengikuti prosedur dan standar yang ditetapkan dalam pedoman ini, diharapkan pengelolaan barang milik negara atau daerah dapat dilakukan secara lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pedoman ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa barang-barang yang menjadi milik publik dikelola dengan baik, sehingga dapat mendukung tujuan-tujuan administratif dan operasional pemerintah dengan lebih efektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa barang milik negara atau daerah tidak hanya tercatat dengan akurat, tetapi juga dikelola secara transparan dan akuntabel.

Secara keseluruhan, pemahaman tentang pengertian aset tetap menurut PSAK 16 dan tata cara penatausahaan barang milik negara atau daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah fundamental untuk mencapai pengelolaan yang baik dan efektif. Aset tetap memerlukan perhatian khusus dalam hal pencatatan dan pelaporan karena dampaknya pada laporan keuangan dan pengelolaan sumber daya. Sementara itu, penatausahaan yang tepat memastikan bahwa barang milik negara atau daerah dikelola dengan baik, mematuhi peraturan yang ada, dan mendukung transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan aset publik.

# Klasifikasi Aset Tetap

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07, aset tetap dalam konteks akuntansi pemerintah dikategorikan ke dalam enam kelompok utama yang masing-masing memiliki karakteristik dan fungsi berbeda. Klasifikasi ini dirancang untuk memudahkan pengelolaan dan pelaporan aset tetap, serta memastikan bahwa setiap jenis aset dicatat dan dilaporkan dengan cara yang sesuai dengan fungsinya dalam mendukung kegiatan pemerintahan.

Pertama, Tanah merupakan salah satu kategori utama dalam klasifikasi aset tetap. Tanah tidak mengalami penyusutan karena sifatnya yang tidak berubah seiring waktu, dan biasanya digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, atau untuk kegiatan administratif. Sebagai aset yang memiliki nilai jangka panjang, tanah dicatat pada nilai perolehannya dan tidak dikenakan penyusutan.

Kedua, Peralatan dan mesin mencakup semua jenis peralatan dan mesin yang digunakan dalam operasi pemerintahan. Ini bisa meliputi alat-alat berat, kendaraan dinas, dan peralatan kantor yang penting untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara efisien. Aset dalam kategori ini mengalami penyusutan sesuai dengan masa manfaatnya, dan nilai penyusutan tersebut harus dicatat dengan cermat dalam laporan keuangan.

Ketiga, Gedung dan bangunan mencakup struktur fisik seperti kantor pemerintah, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas lainnya yang dibangun untuk mendukung pelayanan publik. Gedung dan bangunan, seperti halnya peralatan dan mesin, mengalami penyusutan selama masa manfaatnya. Oleh karena itu, perhitungan penyusutan dan perawatan gedung harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan akurasi laporan keuangan.

Keempat, Jalan, irigasi, dan jaringan adalah kategori yang mencakup infrastruktur penting yang mendukung konektivitas dan layanan publik. Ini termasuk jalan raya, saluran irigasi, dan jaringan utilitas yang mendukung berbagai aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Aset dalam kategori ini juga dikenakan penyusutan berdasarkan masa manfaatnya, dan perawatannya memerlukan perhatian berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan dan fungsionalitas infrastruktur tersebut.

Kelima, Aset tetap lainnya mencakup berbagai jenis aset tetap yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya. Ini bisa meliputi aset- aset khusus yang memiliki karakteristik unik dan digunakan untuk tujuan spesifik dalam kegiatan pemerintahan. Pengelolaan dan pencatatan untuk kategori ini harus dilakukan dengan memperhatikan spesifikasi masing- masing aset.

Keenam, Konstruksi dalam pengerjaan adalah kategori yang mencakup proyek-proyek yang sedang dalam tahap pembangunan atau penyelesaian. Ini termasuk semua biaya yang terkait dengan pembangunan fasilitas baru atau perbaikan besar yang sedang berlangsung. Aset dalam kategori ini akan diklasifikasikan sebagai aset tetap setelah proyek selesai dan mulai digunakan.

Dengan membagi aset tetap ke dalam enam kategori ini, PSAP 07 memastikan bahwa setiap jenis aset dicatat dan dilaporkan dengan cara yang sesuai, mencerminkan fungsinya dalam mendukung kegiatan pemerintahan. Klasifikasi ini juga memudahkan pengelolaan dan pelaporan aset tetap, serta membantu dalam pemantauan dan perencanaan keuangan pemerintah secara lebih efektif.

# Pengukuran Penatausahaan Aset Tetap

Menurut Museliza (2016) penatausahaan aset tetap dibagi menjadi 3, yaitu:

* + - 1. Pembukuan

Pembukuan adalah proses sistematis yang mencakup pencatatan rinci dan teratur mengenai barang-barang milik daerah. Proses ini dimulai dengan langkah awal berupa perekaman semua aset dan transaksi yang terkait dengan barang-barang tersebut ke dalam daftar penggunaan barang. Tujuan utama dari pembukuan adalah untuk memastikan bahwa seluruh informasi tentang barang

milik daerah tercatat dengan akurat dan terperinci, sehingga memudahkan pengelolaan dan pengawasan barang-barang tersebut.

Langkah pertama dalam proses pembukuan adalah pencatatan hasil inventarisasi. Inventarisasi merupakan proses pengumpulan dan pemeriksaan data tentang barang-barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Setelah barang-barang tersebut terdaftar, informasi terkait seperti jumlah, kondisi, dan lokasi barang dicatat secara detail dalam kartu inventarisasi barang. Kartu ini berfungsi sebagai alat untuk melacak dan memantau setiap item barang secara individual, termasuk informasi tentang perolehan, pemindahan, dan penggunaan barang tersebut.

Selain kartu inventarisasi, pembukuan juga mencakup pencatatan informasi dalam daftar barang milik daerah. Daftar ini merupakan dokumen penting yang mencatat seluruh barang milik daerah secara keseluruhan, termasuk kategori, spesifikasi, dan status masing-masing barang. Daftar barang ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai aset yang dimiliki oleh daerah, memudahkan dalam pengelolaan dan pelaporan, serta memastikan bahwa semua barang dapat dipantau dengan efektif.

Pembukuan yang baik tidak hanya mencakup pencatatan awal tetapi juga memerlukan pemeliharaan berkelanjutan. Setiap transaksi yang melibatkan barang milik daerah, seperti pembelian, pemindahan, penggunaan, atau penghapusan, harus dicatat dengan

cermat dan diperbarui secara rutin dalam daftar dan kartu inventarisasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang tercatat selalu akurat dan up-to-date, serta untuk menghindari ketidaksesuaian atau kekeliruan yang dapat memengaruhi pengelolaan dan pelaporan barang.

Selain itu, proses pembukuan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemerintah daerah harus mengikuti pedoman dan standar akuntansi yang ditetapkan untuk memastikan bahwa semua prosedur pembukuan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Ini termasuk memastikan bahwa semua data yang dicatat dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan, serta melakukan audit secara berkala untuk mengevaluasi keakuratan dan keandalan sistem pembukuan.

Secara keseluruhan, pembukuan adalah komponen krusial dalam manajemen barang milik daerah, yang membantu dalam pengelolaan, pelaporan, dan pengawasan aset. Dengan melakukan pencatatan yang teratur dan rinci, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa semua barang milik daerah dikelola dengan baik, mengoptimalkan penggunaan aset, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam administrasi barang. Proses ini juga melibatkan pencatatan penghapusan aset tetap yang rusak atau hilang, serta mengklasifikasikan kembali aset tetap yang ditemukan

setelah dinyatakan hilang pembukuan yang baik dan teliti sangat penting dalam mengelola aset daerah dengan efisien. Setiap transaksi harus dicatat dengan akurat untuk memastikan keberlanjutan dan keberadaan aset tetap. Selain itu, proses pencatatan juga membantu dalam mengidentifikasi aset yang perlu diperbaharui atau diganti agar tetap berfungsi dengan baik. Dengan melakukan pembukuan secara teratur, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pengelolaan aset mereka dan memastikan penggunaan sumber daya yang lebih efektif.

* + - 1. Pelaporan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016, personel yang berwenang yang bertanggung jawab atas aset daerah berhak menyampaikan laporan pengelolaan aset tersebut. Pelaporan tersebut dapat dilakukan setiap semester atau tahunan. Pengguna aset harus menyampaikan laporannya untuk periode masing-masing kepada kepala daerah melalui pengelola aset. Asisten manajemen bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua laporan ini dari masing-masing Perangkat Organisasi (OPD), yang mencakup periode semi-tahunan dan tahunan, serta setiap lima tahun. Selain itu, ringkasan data yang dikumpulkan, termasuk jumlah dan nilai, harus dikumpulkan. Pelaporan, dalam konteks ini, dipahami sebagai proses penyusunan laporan aset untuk setiap periode tertentu, baik semesteran maupun tahunan.

# Pengawasan Keuangan Daerah

* + 1. **Pengertian Pengawasan Keuangan Daerah**

Reydonnyzar dan Suwanda (2019:36) mendefinisikan pengawasan sebagai pendekatan metodis yang bertujuan untuk menetapkan standar kinerja selama tahap perencanaan. Proses ini melibatkan perancangan sistem umpan balik informasi, menilai kinerja aktual terhadap standar yang ditetapkan, mengidentifikasi penyimpangan apa pun, dan menerapkan tindakan perbaikan sesuai kebutuhan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sumber daya organisasi atau pemerintah dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin untuk memenuhi tujuan yang dimaksudkan. (Mau & Sonbay, 2023).

# Pengukuran Pengawasan Keuangan Daerah

Adapun transparansi dapat diukur dengan beberapa idikator, sebagai berikut :

* + - 1. Akurat
			2. Tepat waktu
			3. Perspektif operasional
			4. Fleksibel

# Kerangka Pemikiran Konseptual

Menurut Sugiyono, (2018:95) kerangka pemikiran konseptual menggambarkan hubungan antar variabel yang disusun dari banyak teori

yang djelaskan secara berbeda. Berdasakan teori-teori yang diuraikan kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis. Berikut penjelasan dari kerangka pemikiran:

* 1. Pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyediakan kerangka kerja untuk praktik akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan yang ditujukan untuk pengguna. Standar-standar ini memastikan bahwa laporan keuangan mematuhi persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya (Hidayat et al., 2021).

Hubungan antara standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah didasarkan pada teori keagenan. Menurut teori ini, pemerintah bertindak sebagai agen, yang dipercayakan oleh kepala sekolah untuk menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan pedoman SAP (Philadhelphia et al., 2020). Laporan keuangan yang mematuhi peraturan SAP diharapkan dapat mencapai kualitas tinggi (Pirani et al., 2023).

Implementasi SAP yang efektif sangat penting untuk memenuhi akuntabilitas keuangan daerah dan secara langsung mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Penerapan standar SAP yang tepat oleh karena itu merupakan faktor kunci dalam menentukan kualitas laporan keuangan (Azlim et al., 2012).

Studi yang dilakukan Ariyanti & Ningsih (2023) dan Ikyarti & Aprilia (2019) menunjukkan bahwa tingginya tingkat penerapan SAP berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan terhadap SAP akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disiapkan oleh otoritas pemerintah daerah.

* 1. Pengaruh *Good Governance* terhadap kualitas laporan keuangan

Tata kelola yang baik berfungsi sebagai kerangka dasar untuk mencapai pengelolaan pemerintahan yang efektif. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan daerah sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah daerah harus mahir mengelola sumber daya mereka, khususnya sumber daya keuangan (Philadhelphia et al., 2020).

Tujuan tata kelola yang baik adalah untuk memungkinkan pemerintah menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi, yang menunjukkan pelaksanaan anggaran yang efektif dan pencapaian tujuan pemerintah (Samsiah et al., 2023). Berpegang pada prinsip- prinsip manajemen yang baik, seperti akuntabilitas dan transparansi dalam administrasi keuangan daerah, sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas ini (Azlim et al., 2012).

Pemerintahan yang secara efektif menjalankan fungsinya, memelihara operasi yang bersih, dan memiliki organisasi yang terstruktur dengan baik serta peran yang jelas dianggap mempraktikkan tata kelola yang baik (Maisyaroh, 2023). Perspektif ini didukung oleh Agustiningtyas & Tyasari (2020), yang menemukan bahwa penerapan praktik good governance meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung manajemen pemerintahan yang efektif.

Pemerintah yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance* cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta lebih efisien dalam pengelolaan sumber daya (Philadhelphia et al., 2020).

* 1. Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap terhadap kualitas laporan keuangan

Banyak aset pemerintah daerah masih kekurangan dokumentasi yang jelas mengenai lokasi dan penggunaannya. Manajemen aset yang efektif sangat penting untuk menghasilkan data yang akurat dan andal (Reinelda et al., 2022). Dalam ranah manajemen aset, administrasi memainkan peran kunci, karena kebijakan dan keputusan lebih efektif bila didasarkan pada data yang tepat yang berasal dari kegiatan manajemen aset yang komprehensif (Museliza, 2016).

Administrasi aset tetap yang tepat memastikan bahwa nilai aset tersebut terwakili secara akurat di neraca dan dirinci secara menyeluruh dalam catatan atas laporan keuangan, sehingga menegaskan keandalan dan kualitas laporan keuangan (Widiati et al., 2021). Perspektif ini diperkuat oleh Zulkifli dkk. (2023), yang menyoroti bahwa administrasi aset tetap yang efektif berdampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Demikian pula penelitian Reinelda dkk. (2022) menunjukkan dampak simultan yang besar terhadap kualitas laporan keuangan tersebut.

* 1. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan

Pengawasan mengacu pada proses pengawasan sistematis yang dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan selaras dengan tujuan yang ditetapkan dan mematuhi peraturan yang relevan. Pengawasan keuangan daerah yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa penganggaran dan pengeluaran dilakukan sesuai dengan persyaratan hukum (Pirani et al., 2023). Fase pengawasan ini harus berfungsi untuk memverifikasi bahwa operasi pemerintah dilaksanakan dengan efisiensi ekonomi, efektivitas, dan sejalan dengan kerangka peraturan dan rencana strategis (Adiputera, 2023).

Tujuan pengawasan adalah untuk menentukan apakah kegiatan pemerintahan sesuai dengan peraturan yang ada dan dilakukan secara efisien dan efektif (Zulkifli et al., 2023). Pengawasan yang tepat dan

mematuhi aturan meningkatkan praktik pengelolaan keuangan, sehingga menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi (Mau & Sonbay, 2023). Salah satu fungsi penting pemerintah adalah mengelola keuangan daerah. Melalui pengawasan yang tekun, laporan keuangan yang transparan dan akuntabel dapat dihasilkan, yang kemudian dapat disajikan kepada publik untuk diteliti (Samsiah et al., 2023).

Mendukung pandangan tersebut, Rahayu & Dewi (2022) menemukan bahwa pengawasan keuangan daerah yang efektif berdampak positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian mereka menunjukkan bahwa pengawasan yang dikelola dengan baik, terkendali, dan sistematis dalam Satuan Kerja Daerah (SKPD) secara langsung berkontribusi terhadap produksi laporan keuangan daerah yang berkualitas tinggi.

Berdasarkan pembahasan diatas adanya teori-teori serta keterkaitannya antara variabel dependen dan variabel independen. Sehingga Berikut kerangka pemikiran konseptualnya pada penelitian ini:

H3

H1

H2

*Good Governance* (X2)

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah(X1)

H4

Pengawasan Keuangan Daerah (X4)

Penatausahaan Aset Tetap (X3)

Kualitas Laporan Keuangan (Y)

# Gambar. 1 Kerangka Pemikiran Konseptual

1. **Hipotesis**

H1: Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota Tegal

H2: *Good Governance* Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota Tegal

H3: Penatausahaan Aset Tetap Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota Tegal.

H4: Pengawasan Keuangan Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal.

# BAB III METODE PENELITIAN

# Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif adalah suatu metode yang dipakai dalam analisis yang datanya dinyatakan berupa angka-angka. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu pada penelitian yang akan diuji (Sugiyono, 2018:16).

# Populasi dan Sampel

Populasi merupakan semua elemen atau subjek yang akan diamati kemudian diuji karakteristiknya (Sugiyono, 2018:126). Populasi dalam penelitian ini berjumlah 72 pegawai di 36 OPD di Kota Tegal. Populasi pada penelitian ini terdiri dari 2 pegawai staff keuangan yang ada disetiap OPD. Sampel merupakan bagian dari populasi yang nantinya diuji dengan melihat kekhususan yang ada (Sugiyono, 2018:127). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan sampel jenuh, yang pengambilan sampel didasarkan pada seluruh jumlah dalam wilayah populasi penelitian. Adapun jumlah sampel yang di ambil dalam penelitian

ini adalah semua anggota populasi yang berjumlah 72 responden.

71

# Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

# Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah definisi yang maknanya masih bersifat kurang jelas dan dapat dinamakan sebagai definisi subjectif yang berlaku umum terhadap hal yang saling berkaitan (Suliyanto, 2018:147). Variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu: Variabel Terikat *(Variabel Dependen)* dan Variabel Bebas *(Variabel Independen)*

* + 1. Variabel Terikat (Variabel Dependen) (Y)
			1. Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan adalah dokumen yang disusun dengan cermat yang mencerminkan status keuangan dan transaksi entitas pelapor. Laporan-laporan ini sangat penting untuk memberikan gambaran kesehatan keuangan suatu entitas yang transparan dan akurat (Ariyanti & Ningsih, 2023). Kualitas laporan keuangan dianggap tinggi ketika mereka secara efektif berdampak pada pengambilan keputusan, memastikan bahwa informasi yang diberikan berharga dan dapat diterapkan bagi pengguna data ekonomi regional (Hidayat et al., 2021).

* + 1. Variabel Bebas (Variabel Independen)
			1. Implementasi Standar Akuntansi Pemeintah

Standar Akuntansi Pemerintah adalah standar yang diikuti oleh lembaga pemerintah pusat maupun daerah dalam mewujudkan mutunya sebuuah laporan suatu keuangan (Maisyaroh, 2023). Standar akuntansi pemerintah merupakan persyaratan wajib yang menjadi pedoman untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. (Philadhelphia et al., 2020).

* + - 1. *Good Governance*

Menurut Reydonnyzar and Suwanda (2019:62) *Good governance* adalah pengelolaan yang baik dengan prinsip keterbukaan, keadilan dan pertnaggungjawaban untuk mencapai tujuan organisasi yang sesuai. Penerapan *good governance* tidak hanya menjadi tugas pemerintah, namun juga menjadi tanggungjawab seluruh pihak yang terlibat dalam sistem pemerintahan (Agustiningtyas & Tyasari, 2020).

* + - 1. Penatausahaan Aset Tetap

Penatausahaan adalah serangkaian aktivitas terkoordinasi yang mencakup beberapa proses penting, yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah, yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku (Widiati et al., 2021). Aktivitas penatausahaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh barang milik daerah dikelola

secara sistematis, terstruktur, dan akurat, dengan memperhatikan kepatuhan terhadap standar dan peraturan yang ditetapkan.

Pembukuan merupakan bagian integral dari penatausahaan yang melibatkan pencatatan semua transaksi dan pergerakan barang milik daerah ke dalam buku catatan atau sistem akuntansi yang telah disiapkan. Proses ini melibatkan pencatatan rinci mengenai semua pembelian, penggunaan, pemindahan, dan penghapusan barang, dengan tujuan untuk memelihara catatan yang akurat dan lengkap. Pembukuan yang baik memastikan bahwa setiap transaksi terkait barang dapat dilacak dan diverifikasi, serta mendukung pelaporan yang transparan dan akuntabel.

Selanjutnya, inventarisasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mendokumentasikan barang milik daerah. Proses ini melibatkan pemeriksaan fisik dan pencatatan semua barang yang dimiliki oleh daerah, termasuk informasi mengenai jumlah, kondisi, lokasi, dan spesifikasi barang. Inventarisasi ini penting untuk memastikan bahwa data yang ada mengenai barang milik daerah adalah akurat dan up-to-date, serta untuk mendeteksi adanya kehilangan, kerusakan, atau ketidaksesuaian lainnya yang mungkin terjadi.

Proses pelaporan adalah langkah terakhir dalam penatausahaan yang melibatkan penyampaian informasi tentang barang milik daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti otoritas pemerintah, lembaga pengawas, dan publik. Pelaporan harus dilakukan secara teratur dan akurat, mencakup informasi terkait status, kondisi, dan penggunaan barang. Pelaporan yang baik memastikan bahwa semua informasi terkait barang milik daerah tersedia dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan yang berbasis data.

Selain itu, dalam konteks penatausahaan, aset tetap merujuk pada jenis aset yang bersifat jangka panjang dan memiliki nilai permanen. Aset tetap adalah barang-barang yang digunakan dalam jangka waktu yang lama dan memiliki bentuk fisik, seperti tanah, bangunan, peralatan, dan mesin. Aset ini berbeda dari aset lancar, yang biasanya digunakan atau dikonsumsi dalam siklus akuntansi yang lebih pendek. Aset tetap memiliki masa manfaat yang relatif lama dan umumnya digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan administrasi pemerintah daerah.

Aset tetap, karena sifatnya yang jangka panjang dan berwujud, memerlukan perhatian khusus dalam hal pencatatan, pengelolaan, dan pemeliharaan. Pencatatan aset tetap harus

dilakukan dengan detail, mencakup informasi tentang perolehan, nilai, masa manfaat, dan penyusutan. Pengelolaan aset tetap juga mencakup perawatan dan perbaikan untuk memastikan bahwa aset tersebut tetap berfungsi dengan baik selama masa manfaatnya.

Secara keseluruhan, penatausahaan yang efektif melibatkan proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan yang terintegrasi, dengan tujuan untuk memastikan bahwa barang milik daerah, termasuk aset tetap, dikelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini mendukung pengelolaan aset yang transparan, akuntabel, dan efisien, serta membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat. (Zulkifli et al., 2023).

* + - 1. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan ialah upaya mendeteksi penyimpangan dan kegagalan pengelolaan keuangan daerah. Jika terjadi penyimpangan atau kegagalan di kemudian hari, setidaknya dapat mengambil langkah untuk segera mengatasinya (Rahayu & Dewi, 2022). Tujuan utama pengawasan tidak hanya untuk menemukan kesalahan, tetapi juga untuk melaksanakan kegiatan sedemikian rupa sehingga rencana yang telah ditetapkan mencapai tujuannya Pengawasan keuangan daerah setidaknya dapat memastikan pelaksanaan kegiatan nasional terlaksana

sesuai dengan rencana anggaran dan peraturan perundang- undangan (Mau & Sonbay, 2023).

# Operasional Variabel

Suatu variabel konseptual dapat memiliki operasional variabel yang berbeda-beda (Suliyanto, 2018:147). Operasional variabel diperlukan untuk menentukan dimensi, indikator dan skala yang dipakai oleh setiap variabel-variabel yang dipakai. Berikut tabel yang dibuat:

# Tabel 3. 1 Operasional Variabel

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Dimensi** | **Indikator** | **Skala** |
| Kualitas Laporan Keuangan (Y)(Murniati, 2021) | 1. Relevan | 1. Memiliki Manfaat umpan baik *(feedback value)*
2. Memiliki manfaat prediktif *(preditive value)*
3. Tepat waktu
4. Lengkap
 | Interval |
| 2. Andal | 1. Penyajian jujur
2. Dapat diverifikasi

*(verifiability)*1. Netralitas
 | Interval |
| 3. Dapat Dipahami | 1. Dapat dipahami oleh pengguna
2. Mudah dipahami
 | Interval |
| 4. Dapat Dibandingkan | 1. Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya
2. Penggunaan kebijakan akuntansi
 | Interval |
| Implement asi Standar Akuntansi Pemerinta h (X1)(Ikyarti & Aprilia, 2019) | 1. Penyajian laporan keuangan | 1. Pencatatan
2. Penyajian berdasarkan basis
 | Interval |
| 2. Laporan realisasi anggaran berbasis kas | 1. Penyajian ikhtisar sumber, alokasi dan pengumuman sumber daya ekonomi | Interval |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Dimensi** | **Indikator** | **Skala** |
|  |  | 2. Penyajian realisasi pendapatan dan belanja |  |
| 3. Laporan arus kas | 1. Penyajian keluar masuk kas
2. Pencatatan
 | Interval |
| 4. Catatan atas laporan keuangan | 1. Penyusunan sistematis
2. Pengungkapan
 | Interval |
| 5. Akuntansi persediaan | 1. Pengakuan persediaan
2. Penyesuaian dengan inventaris fisik
 | Interval |
| 6. Akuntansi investasi | 1. Klasifikasi investasi
2. Pengakuan hasil investasi
 | Interval |
| 7. Akuntansi aset tetap | 1. Klasifikasi aset tetap
2. Penilaian aset tetap
 | Interval |
| 8. Akuntansi kewajiban | 1. Klasifikasi kewajiban
2. Pencatatan kewajiban
 | Interval |
| 9. Koreksi kesalahan | 1. Penyesuaian dan pengungkapan jumlah koreksi
2. Penyajian dan pengungkapan perubahan kebijakan akuntansi
 | Interval |
| 10. Laporan keuangan konsolidasi | 1. Informasi laporan keuangan konsolidasian
2. Komponen laporan keuangan konsolidasian
 | Interval |
| 11. Laporan Operasional | 1. Waktu penyajian
2. Unsur yang disajikan
 | Interval |
| *Good Governan ce* (Agustinin gtyas & Tyasari, 2020) | 1.Akuntabilitas | 1. Pemahaman individu terhadap tugas dan wewenang masing- masing
2. Pemahaman terhadap penetapan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing jajaran yang selaras dengan visi dan misi instansi
 | Interval |
| 2. Transparansi | 1. Sistem komunikasi yang baik dengan masyarakatseperti dengan pelayanan | Interval |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Dimensi** | **Indikator** | **Skala** |
|  |  | 2. Penyampaian penggunaan kas dinas kepada masyarakat secara terbuka |  |
| 3. Penetapan hukum | 1. Penerapan hukum kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin
2. Keadilan sanksi yang diberikan kepada pegawai dan pemimpin

yang melanggar peraturan | Interval |
| 4.Responsivitas | 1. Aktif dalam menanggapi kebutuhan masyarakat
2. Mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam penyusunan

kebijakan | Interval |
| 5. Efisien dan efektif | 1. Efisiensi dan efektif dalam pengelolaan sumber daya publik
2. Penyelenggaran kegiatan instansi dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
 | Interval |
| Penatausa haan Aset Tetap (Museliza, 2016) | 1. Pembukuan | 1. Pendaftaran dan pencatatan
2. Pengkalsifikasian
3. Mencatat setiap transaksi
 | Interval |
| 2. Inventarisasi | 1. Mencatat seluruh aset
2. Melaporkan setelah di inventarisasi
3. Penggunaan barang
 | Interval |
| 3. Pelaporan | 1. Mengumpulkan laporan penggunaan
2. aporan mutasi tiap semester
3. Laporan inventarisasi
 | Interval |
| Pengawas an keuangandaerah | 1. Akurat | 1. Mampu mendorong setiap SKPD agar menghasilkan informasiyang benar dan real | Interval |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Dimensi** | **Indikator** | **Skala** |
| (Mau & Sonbay, 2023) |  | 2. Penerimaan, pendapatan, dan penghematan telah dilakukan. |  |
| 2. Tepat waktu | 1. Informasi yang dihasilkan tepat waktu.
2. Informasi yang dihasilkan dapat dikelompokkan dan

dievaluasi | Interval |
| 3. Perspektif operasional | 1. Dapat mengindentifikasi tindakan perbaikan.
2. Pengawasan keuangan dilakukan oleh pengawas intern.
3. Pengawasan keuangan dilakukan oleh pengawas ekstern.
4. Pengawas dilakukan oleh DPRD.
 | Interval |
| 4. Fleksibel | 1. Pengawasan dan pengendalian untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Adanya sanksi bagi yang melanggar.
 | Interval |

# Metode Pengumpulan Data

Kuisioner merupakan teknik yang cukup efisien untuk mengumpulkan data ketika peneliti mengerti variabel yang diukur dan tujuan dari responden.

# Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan bantuan program *Satistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 22.0.

# Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai metode analisis datanya. Prosesnya melibatkan beberapa langkah berurutan: awalnya, statistik deskriptif digunakan untuk merangkum data. Hal ini diikuti dengan penilaian kualitas data melalui berbagai tes. Tes asumsi klasik kemudian dilakukan, termasuk tes multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan normalitas. Selanjutnya, analisis regresi linier berganda dilakukan, yang berpuncak pada pengujian hipotesis. Metode analisis data bisa dijabarkan sebagai berikut:

# a. Uji Realibilitas

Pengujian reabilitas ini dibatasi pada Item yang valid yaitu item yang telah melalui uji validitas. Terdapat dua cara untuk mengukur reabilitas (Ghozali, 2018:45) yaitu :

1. Metode retest : mengukur konsistensi jawaban responden pada dua waktu pengukuran yang berbeda.
2. Metode konsistensi internal : mengukur seberapa besar pernyataan atau indikator kuesioner berkorelasi satu sama lain.

Dengan menggunakan metode-metode tersebut maka dapat diketahui sejauh mana kuesioner dapat dipercaya untuk mengukur variabel atau keadaan yang diinginkan. Untuk pengujian reliabilitas dimanfaatkan Cronbanch Alpha dan hasilnya dapat dilihat dari nilai

Correlation Between Forms yaitu jika Nilai alpha > nilai r tabel 0,7 maka dapat dikatakan reliabel.

# Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji untuk menentukan ketepatan model. Model perlu diuji atas beberapa asumsi klasik yang meliput beberapa pengujian (Ghozali, 2018:107). Berikut penjabaran dari macam-macam uji asumsi klasik:

# Uji Normalitas

Apabila saat uji asumsi ada yang ditentang maka uji statistik menunjukkan hasil tidak valid dengan permasalahan pada sampel yang sedikit (Ghozali, 2018:161). Pada penelitian ini untuk menguji normalitas memakai uji statistik non parametik *Kolmogorov-Smirnov.* Menguji *Kolmogorov-Smirnov* dengan menguji hipotesis berikut (Ghozali, 2018:166):

H0: menunjukkan hasil berdistribusi normal.

HA: menunjukkan hasil berdistribusi tidak normal. Dengan persyaratan apabila:

H0: menunjukkan hasil berdistribusi normal jika, nilai probabilitas > dari nilai signifikan yakni 0,05.

HA: menunjukkan hasil berdistribusi tidak normal jika, nilai probabilitas < dari nilai signifikan yakni 0,05.

# Uji Multikolinearitas

Dikatakan baik apabila, model regresi diuji dan hasilnya menunjukkan bahwa variabel independen tidak ada korelasi (Ghozali, 2018:107). Untuk mengetahui telah terjadi atau tidak ada multikolinearitas pada model regresi sebagai berikut (Ghozali, 2018:107):

* 1. Dengan melihat nilai R²
	2. Melihat korelasi antara variabel independen dan variabel dependen jika antara variabel tersebut adanya nilai korelasi tinggi ini mengindentifikasikan adanya multikolinearitas
	3. Dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF).

Untuk menunjukkan adanya indikasi multikolinearitas menerangkan apabila nilai *tolerance* ≤ 0.10 atau dengan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) ≥ 10.

# Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah kondisi di mana varian menghasilkan hasil yang berbeda. Jika tidak terjadi heteroskedastisitas, maka model regresi dikatakan berkinerja baik. (Ghozali, 2018:137). setelah dijadikan *studentized* (Ghozali, 2018:138).

# Uji Regresi Linear Berganda

Model persamaan regresi yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

Y = α + β1X1 + β2X2+ β3X3 + β4X4 + e

Keterangan:

Y = Kualitas Laporan Keuangan

α = konstanta

β1β2β3β4 = koefisien regresi dari setiap variabel independen X1 = Implementasi SAP

X2 = Good Governance

X3 = Penatausahaan Aset Tetap

X4 = Pengawasan Keuangan Daerah

e = Error

# Uji Hipotesis

1. **Uji Kelayakan Model (Uji F)**

Adapun pengujian hipotesisi yaitu dengan menggunakan distribusi F. dengan α = 0,05.kriteria untuk uji kelayakan model (uji F)

# Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) bertujuan agar dapat menilai hasil yang mendekati variabel bebas dalam memberikan informasi yang dapat digunakan untuk menyelidiki variasi pada varaibel terikat (Ghozali, 2018:97). Koefisien determinasi (R2) dapat diartikan sebagai alat untuk mengukur sejauh mana keahlian model untuk menerangkan variasi pada variabel dependen. Pada koefisisen determinsi nilainya yaitu nol sampai satu. Ketika hasil (R2) tidak memiliki korelasi=0 artinya pengaruh yang dimiliki pada variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat terbatas.